

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Dengan adanya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung yang lumayan tinggi, maka mengakibatkan permasalahan sosial, yaitu salah satunya berupa permasalahan kemiskinan.

Kemiskinan di Kota Bandung tentunya selalu menjadi topik utama permasalahan yang terjadi dan menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Bandung hingga kini. Meski dalam lingkup nasional laporan mengenai jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yakni pada kurun waktu tahun 2008-2012 diinformasikan jumlah penduduk miskin berkurang 13,11 juta jiwa atau dari 41,7 juta jiwa menjadi 28,59 juta jiwa, namun persoalan kemiskinan tetap urgen diperhatikan secara serius. Mengacu pada batasan garis kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada tahun 2008 sebanyak 106.786 jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebanyak 110.283 jiwa dan 118.600 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah kemiskinan mengalami penurunan menjadi 116.940 jiwa.<sup>1</sup>

Dalam hal upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan penanggulangan kemiskinan. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin yaitu dengan menegakkan sistem zakat, dimana hal ini merupakan salah satu kewajiban utama bagi pemerintah, karena pemerintah memikul tanggung jawab untuk memelihara semua orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah fisik maupun ekonominya.

---

<sup>1</sup><http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/17/058701386/data-penduduk-kotabandung-siang-d-3-juta-malam-2-juta> diakses pada tanggal 27 Desemt 1 15

Pemerintah wajib membentuk badan yang dikenal dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Dalam konteks ini, pengertian pemerintah bisa bermakna Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan salah satu bentuk kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin sebagaimana diuraikan di atas yaitu menegakkan sistem zakat dengan membentuk BAZ sebagai badan yang mengelola dana zakat. Demi keberhasilan upaya tersebut, maka BAZ sebagai salah satu badan/instansi yang berperan dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin perlu dikelola dengan baik. Suatu badan/Instansi akan berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh kinerja pengelola yang baik, karena kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat dominan sebagai penunjang keberhasilan tujuan dari suatu badan/instansi.

Selain faktor kinerja pengelola, karena BAZ merupakan salah satu badan yang mengelola dana zakat dan dalam ajaran Islam peruntukan dana zakat sudah ditentukan, sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran surat At Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut salah satu yang berhak menerima dana zakat adalah orang-orang miskin. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya BAZ sebagaimana di atas sudah dijelaskan yaitu mengurangi jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, faktor ketepatan penyaluran dana zakat yang terhimpun juga merupakan salah satu faktor keberhasilan dari tujuan dibentuknya BAZ. Sehingga dapat dipahami bahwa peranan utama dari BAZ adalah suatu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas berkenaan dengan salah satu penunjang keberhasilan tujuan dari suatu badan/instansi yaitu kinerja pengelola. Maka terlebih dahulu perlu mengetahui dan memahami konsep kinerja. Menurut Stolovitch and Keeps mengemukakan bahwa kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Griffin bahwa kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja.<sup>3</sup> Dan juga Casio mengemukakan bahwa kinerja merujuk kepada pencapaian tujuan karyawan atas tugas yang

---

<sup>2</sup> Harold D Stolovitch and Erica J Keeps, *Handbook of Human Performance Technology A Comprehensive Guide for Analysis and Solving Performance Problem in Organizations* (San Francisco: Jersey-Bass Publisher, 1992), 34.

<sup>3</sup> Ricky W Griffin, *Management* (Boston: Houghton Mifflin, 1987), 67.

diberikan.<sup>4</sup> Donnelly mengemukakan juga bahwa kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.<sup>5</sup>

Di atas telah dijelaskan pula bahwa selain faktor kinerja, faktor lain yang menunjang keberhasilan dari tujuan dibentuknya BAZ adalah faktor ketepatan penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, perlu juga mengetahui dan memahami konsep pendistribusian dana zakat agar tepat sasaran. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat sebagai berikut:

1. pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin.
2. Pendekatan struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki.<sup>6</sup>

Kemudian sebagaimana di atas telah dijelaskan bahwa pembentukan BAZ dimaksudkan untuk suatu upaya dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin. Pengurangan jumlah masyarakat miskin disebut juga dengan istilah pengentasan kemiskinan. Menurut Program Pembangunan Nasional (Propenas) dalam upaya pengentasan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara akibat dampak negatif krisis ekonomi dan kemiskinan struktural;
2. Melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural, antara lain memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha, dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Wayne F Casio, *Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profit* (Singapore: McGraw-Hill International Editors, 1992), 137.

<sup>5</sup> James H Donnelly, Gibson, James L., and John Ivancevich, *Fundamental of Management*. (Texas: Business Publication, 1994), 210.

<sup>6</sup> Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 103-104.

<sup>7</sup> Tim BPPN, *Peta Kemiskinan di Indonesia* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003),

Berdasarkan uraian di atas berkenaan dengan konsep kinerja suatu badan/instansi, yang mana dalam tulisan ini instansi yang dimaksud adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung yang berada di Jl. Wastukencana No. 27 Bandung. Tentunya BAZNAS Kota Bandung memiliki tujuan dan maksud tertentu yang ditentukan. Keberhasilan tercapainya hal tersebut berkaitan erat dengan kinerja para pengelola BAZ Kota Bandung.

Adapun maksud dan tujuan dari BAZNAZ Kota Bandung khususnya program kerja bidang pemberdayaan melalui salah satu programnya pada bidang ekonomi yaitu melaksanakan kegiatan bantuan modal bergulir. Kegiatan bantuan modal bergulir ini memiliki target yang ingin dicapai. Target dari kegiatan ini yaitu memberdayakan kerja pengusaha kecil yang kekurangan modal usaha dan memberikan bantuan modal kepada perorangan yang melakukan perintisan usaha.

Kegiatan bantuan modal bergulir yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandung telah berlangsung cukup lama yaitu kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2010. Akan tetapi dampak dari kegiatan tersebut belum terasa secara signifikan. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara BAZNAS kota dengan kecamatan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kegiatan tersebut. Penyebab lain dari belum terasa secara signifikannya kegiatan tersebut yaitu tidak adanya pendampingan terhadap para penerima bantuan dana bergulir. Hal ini mengakibatkan dana yang harusnya dikembalikan kepada BAZNAZ Kota Bandung oleh para penerima bantuan dana bergulir kurang berjalan dengan baik, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Pendistribusian dan Penerimaan Setoran Dana Zakat**  
**Kegiatan Bantuan Dana Bergulir BAZNAS Kota Bandung**  
**Tahun 2012 s/d 214<sup>8</sup>**

No	Tahun	Dana yang didistribusikan	Dana yang kembali
1	2012	35.900.000	25.130.000
2	2013	27.920.000	19.544.000
3	2014	152.950.000	107.065.000

Tabel di  
atas menunjukkan  
bahwa dana

<sup>8</sup> Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Bandung yang telah diolah

yang dikembalikan oleh para penerima bantuan dana bergulir setiap tahun tidak kembali utuh 100% kepada BAZNAS. Hal tersebut seperti terlihat pada tabel di atas bahwa pada tahun 2012 dana yang dikembalikan sebesar 70 % dan pada tahun 2013 sebesar 70% begitu juga pada tahun 2014 sebesar 70%, padahal dana tersebut akan digulirkan kepada pihak lain. Dengan adanya hal tersebut kegiatan bantuan modal bergulir setidaknya menjadi terhambat. Sehingga untuk mewujudkan target dari kegiatan tersebut menjadi terkendala.

Ketercapaian dari target kegiatan bantuan modal bergulir BAZNAS Kota Bandung, selain dipengaruhi oleh kinerja pengelola juga dipengaruhi oleh ketepatan penyaluran. Dalam hal ini yang dimaksud ketepatan penyaluran adalah pendistribusian dana dari kegiatan tersebut. Perencanaan pendistribusian dana untuk kegiatan ini difokuskan pada kaum *dhuafa* yang sedang melakukan usaha atau merintis usaha kecil dan membutuhkan bantuan modal usaha. Adapun perencanaan BAZNAS Kota Bandung dalam pendistribusian dana untuk kegiatan tersebut adalah seperti tampak pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan dan Pengeluaran Zakat Profesi BAZNAS Kota Bandung**  
**Tahun 2012 s/d 2014<sup>9</sup>**

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
	Penerimaan Dana	1.693.520.397	2.064.508.554	2.645.716.236
	Pengeluaran			
1	Biaya Bank	2.067.310	1.407.018	5.892.092
2	Dana Pengelolaan	193.828.485	421.586.794,73	437.520.000
3	Mustahik UPZ Dinas/Kantor/Bagian /Kec/instansi	428.100.000	659.796.690,00	903.700.000
4	Mustahik yang langsung datang ke sekretariat BAZNAS	601.920.000	146.150.000,00	120.760.000
5	Bantuan Pendidikan	361.250.000	456.750.000,00	225.300.000
6	Sosial Da'wah	27.500.000	19.000.000,00	306.850.000
7	Ekonomi	35.900.000	27.920.000,00	152.950.000
8	Kesehatan	68.344.000	56.680.915,00	48.976.000

<sup>9</sup> Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Bandung yang telah diolah.

	Jumlah Pengeluaran Dana	1.718.909.795	1.789.291.417,73	2.201.948.092
--	-------------------------	---------------	------------------	---------------

Be

rdasarkan tabel tersebut dijelaskan bahwa setiap tahun penggunaan dana zakat untuk usaha produktif di bidang ekonomi berupa dana bergulir mengalami peningkatan yang sangat besar. Pada tahun 2014 jumlah dana yang dialokasikan untuk bidang ekonomi sebesar 152.950.000. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013. Namun terlihat jauh bila dibandingkan dengan pengeluaran untuk sektor konsumtif seperti dana bagi mustahik UPZ Dinas/Kantor/Bagian/kec/Instansi yang terlihat mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah dana yang dialokasikan untuk mustahik UPZ Dinas/Kantor/Bagian/kec/Instansi sebesar 903.700.000. Jumlah ini sangat besar sekali dibandingkan dengan jumlah dana untuk bidang ekonomi yang hanya sebesar 152.950.000.

Dengan adanya uraian di atas berkenaan dengan pendistribusian dana zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota Bandung, maka dapat dipahami bahwa dana untuk kegiatan ekonomi khususnya pada kegiatan bantuan dana bergulir sangat minim sekali yaitu sekitar 5,8%. Sementara untuk kegiatan yang bersifat konsumtif Mencapai kurang lebih 34%.

Berkenaan dengan uraian di atas mengenai kinerja pengelola dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS kota Bandung secara nyata dilapangan khususnya pada bidang ekonomi melalui kegiatan bantuan dana bergulir, maka hasilnyan dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Data Mustahik dan Muzaki BAZNAS Kota Bandung**  
**Tahun 2012 s/d 2014<sup>10</sup>**

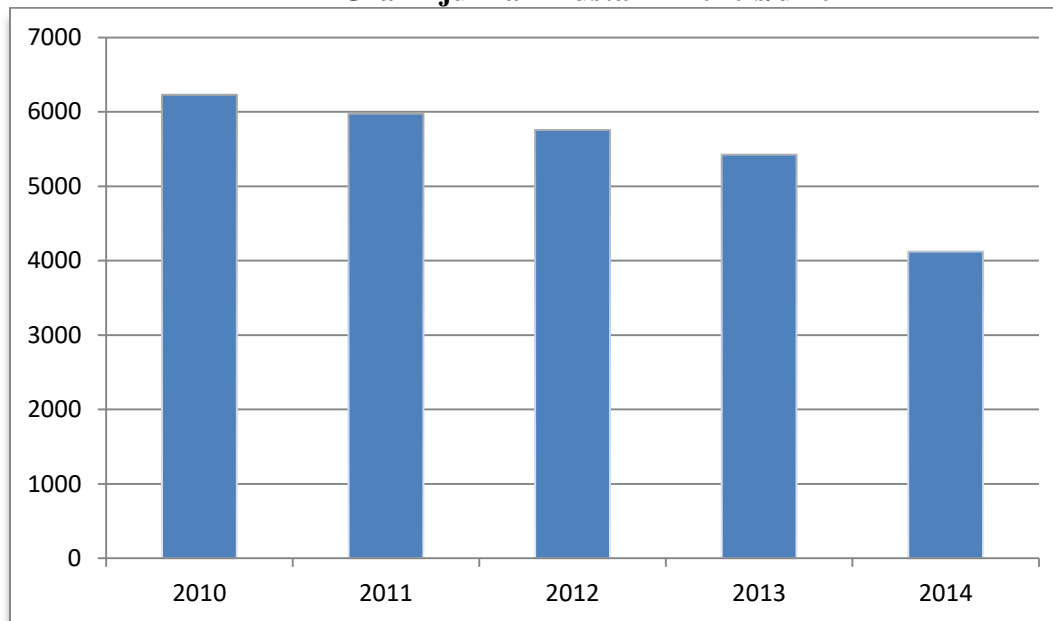
No	Nama	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Muzaki	-	-	-	-	5199 orang
2	Mustahik	6229 orang	5974 Orang	5756 orang	5426 orang	4121 orang

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah mustahik dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang fluktuatif. Perubahan jumlah mustahik dari tahun ke tahun dapat dilihat dengan jelas pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1**

<sup>10</sup> Sumber: Dokumen BAZNAS Kota Bandung yang telah diolah

Grafik jumlah mustahik 2010 s/d 2014<sup>11</sup>



Pada tahun 2010 jumlah mustahik sebanyak 6229 orang kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 5974 orang dan pada tahun berikutnya jumlah mustahik terus mengalami penurunan, samapai tahun 2014 jumlah mustahik menjadi 4121 orang, sedangkan jumlah *muzaki* keseluruhan sampai tahun 2014 berjumlah 5199 orang.

Dengan adanya uraian di atas berkenaan dengan hasil dari pelaksanaan salah satu program BAZNAS Kota Bandung pada bidang ekonomi melalui kegiatan bantuan modal bergulir, kiranya dapat dipahami bahwa kegiatan tersebut dapat mengurangi jumlah *mustahik*. Dimana yang dimaksud *mustahik* disini sebagaimana telah diuraikan di atas adalah kaum *dhuafa* atau masyarakat fakir dan miskin. Penurunan jumlah mustahik secara drastis dari 6.229 menjadi 4121 orang. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah *muzaki* dan penurunan jumlah *mustahik* yang kemungkinan disebabkan oleh sebagian *mustahik* yang berusaha untuk merubah dirinya untuk menjadi *muzaki*.

Adapun target BAZNAS Kota Bandung berkenaan dengan pengentasan kemiskinan melalui program dana bergulir adalah mengurangi jumlah *mustahik* sebesar 50 % dalam kurun waktu 5 tahun. Sedangkan hasil yang telah diperoleh sebagaimana telah diuraikan di atas berkenaan dengan pengurangan jumlah *mustahik* melauai program dana bergulir kurang lebih selama 5 tahun yang dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah 33 %. Oleh karena itu

<sup>11</sup> Sumber: Tabel data Mustahik dan muzaki BAZNAS Kota Bandung tahun 2010 s/d 2014

jumlah yang dicapai belum maksimal, karena masih ada kekurangan sebesar 17 % dari jumlah yang ditargetkan.

Berdasarkan uraian di atas berkenaan dengan pelaksanaan salah satu program BAZNAS Kota Bandung pada bidang ekonomi melalui kegiatan bantuan modal bergulir sangat membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Akan tetapi keberhasilan kegiatan bantuan modal bergulir tersebut tidak terlepas dari kinerja pengelola dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Bandung. Hal ini sebagaimana di atas telah dijelaskan bahwa kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Dan kinerja pengelola BAZNAS Kota Bandung saat ini belum dilaksanakan secara maksimal sebagaimana di atas telah dijelaskan, akan tetapi hasilnya sudah terlihat. Oleh karena itu, apabila kinerja pengelola terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara maksimal maka akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Dan juga apabila pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Bandung memberikan alokasi dana yang lebih besar untuk kegiatan bantuan modal bergulir dibandingkan alokasi dana untuk kegiatan yang lain yang bersifat konsumtif seperti telah diuraikan di atas, maka hal tersebut memungkinkan untuk lebih mempercepat penurunan jumlah *mustahik* atau jumlah orang-orang miskin.

Dari uraian di atas berkenaan dengan kaitan kinerja pengelola dan ketepatan penyaluran atau pendistribusian dana zakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan modal bergulir pada BAZNAS Kota Bandung, maka dapat dipahami bahwa kinerja pengelola sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Bandung. Begitu juga dengan ketepatan penyaluran atau pendistribusian dana zakat berpengaruh juga terhadap pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kota Bandung. Kedua hal tersebut harus saling terkait satu sama lain, sehingga tidak terjadi ketimpangan, karena apabila kinerja pengelola dilaksanakan secara maksimal, namun dana yang tersedia tidak memenuhi, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan bantuan modal bergulir tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila dana yang dialokasikan untuk kegiatan bantuan modal bergulir sangat besar, namun tidak dikelola dengan baik, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dengan adanya uraian tersebut, penulis akan meneliti dan membahas lebih lanjut berkenaan dengan kinerja pengelola dan ketepatan sasaran penyaluran dana bergulir pada BAZNAS Kota Bandung yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, penulis akan menuangkan tulisannya dalam



sebuah karya ilmiah berupa tesis dengan judul **“Pengaruh Kinerja Pengelola dan Ketepatan Penyaluran Dana Bergulir Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung”**.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kinerja pengelola dana bergulir terhadap pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh ketepatan penyaluran dana bergulir terhadap pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh kinerja pengelola dan ketepatan penyaluran dana bergulir terhadap pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kota Bandung ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh kinerja pengelola dana bergulir terhadap pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kota Bandung;
- b. Untuk menganalisis pengaruh ketepatan penyaluran dana bergulir terhadap pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kota Bandung;
- c. Untuk menganalisis pengaruh kinerja pengelola dan ketepatan peyaluran dana bergulir terhadap pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kota Bandung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian diharapkan berguna secara akademik karena diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual ekonomi syariah terutama mengenai peranan sistem ekonomi syariah dalam penegentasan kemiskinan. Selain itu memberi masukan juga kepada BAZNAS Kota Bandung dalam pengelolaan dana zakat yang terhimpun. Berguna juga secara praktis, karena dapat dijadikan informasi oleh setiap LPZ dalam pengelolaan dana zakat.

Sehingga dana zakat dapat dikelola secara optimal dan kontribusi LPZ dalam mengentaskan kemiskinan dapat terwujud.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Daerah*, *Tesis* (tidak dipublikasikan), (oleh Prayitmo, SH). Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah ini berangkat dari potensi zakat yang memiliki potensi strategis yang menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan di Indonesia. Tulisan ini hendak memecahkan bagaimana tinjauan hukum pengelolaan zakat terhadap program dan operasional Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Hasil dari penelitian ini bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang ada pada BAZDA Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, dimana pengelolaan lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Kegiatan BAZDA kabupaten Muna ini didukung pula dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004.

Teori yang dipakainya adalah berupa kebijakan berkenaan dengan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Adapun metodologi yang digunakan adalah metode empiris dan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang ada pada amil zakat daerah kabupaten Muna telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perbedaan dengan pembahasan yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah bukan kesesuaian dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan program dana bergulir di BAZ Kota Bandung, namun seberapa besar pengaruh program ini dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga yang menjadi aspek penelitiannya bukan hukum, tetapi pengaruh pelaksanaan program tersebut.

2. Penulis tesis dengan judul “Efektifitas Program Pinjaman Bergulir (PNPM Mandiri

Perkotaan) di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kora Medan”, *Tesis* (tidak dipublikasikan), (Ditulis Oleh: Patuan Togu P. Jayapura). Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan program pinjaman bergulir di Kelurahan tersebut. Teori yang dipakainya adalah teori efektifitas. Adapun metodologinya yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih kurang efektifnya pelaksanaan program pinjaman bergulir di kelurahan karang berombak.

Adapun perbedaan dengan pembahasan yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah terletak pada instansi yang dijadikan sumber penelitian. Selain itu sumber dana yang dijadikan penunjang pelaksanaan program dana bergulir berbeda. Dimana dalam penelitian tesis ini adalah bantuan dana dari pemerintah, sedangkan dalam penelitian yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah dana Zakat yang terhimpun.

3. Hani Widyani, Penulis tesis dengan judul “Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Dana Bergulir BAZ Kota Bandung”, *Tesis* (tidak dipublikasikan), Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi program dan bergulir dengan cara memberikan modal usaha dan pendampingan yang dilakukan oleh BAZ Kota Bandung. Teori yang dipakainya adalah teori kebijakan publik dan juga kebijakan BAZ Kota Bandung serta kebijakan Pemerintah Kota Bandung.

Adapun perbedaan dengan pembahasan yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah bukan untuk menganalisis pelaksanaan program dana bergulir BAZ Kota Bandung, tetapi dalam tulisan ini akan dibahas berkenaan dengan seberapa besar pengaruh dan kontribusi dari program dana bergulir BAZ Kota Bandung terhadap pengentasan kemiskinan.

Beberapa penelitian dalam bentuk tesis tersebut di atas memiliki persamaan pembahasan berkenaan dengan program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana zakat yang terhimpun oleh BAZ. Hal tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.4**  
**Hasil Penelitian**  
**Pemanfaatan Dana Zaka yang Terhimpun oleh BAZ**

No	Nama	Judul Tesis	Pokok Pikiran
1	Prayitmo	Optimalisasi	pengelolaan zakat,

		<p>Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Daerah</p>	<p>infaq dan shadaqah yang da pada BAZDA Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, dimana pengelolaan lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna</p>
2	Patuan Togu	<p>Efektifitas Program Pinjaman Bergulir (PNPM Mandiri Perkotaan) di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kora Medan</p>	<p>kurang efektifnya pelaksanaan program pinjaman bergulir di kelurahan karang berombak</p>
3	Hani Widyani	<p>Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Dana Bergulir BAZ Kota Bandung</p>	<p>mendesripsikan implementasi program dan bergulir dengan cara memberikan modal usaha dan pendampingan yang dilakukan oleh BAZ Kota Bandung</p>

Adapun perbedaan dari ketiga hasil penelitian di atas dengan penelitian yang akan dituang dalam tulisan ini adalah terletak pada substansi yang menjadi objek penelitian yang berpengaruh terhadap objek lainnya.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Konsep Kinerja

Setiap pengelola sesuai dengan jenjang dan jabatannya, diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang baik. Dalam pelaksanaan tugasnya harus mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan/instansi sehingga menghasilkan *output* yang berkualitas. Tujuan dari suatu perusahaan atau instansi yang menghasilkan *output* yang berkualitas ditentukan berbagai faktor diantaranya adalah melalui kinerja pengelola.

Menurut Stolovitch and Keeps mengemukakan bahwa kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Griffin bahwa kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja.<sup>13</sup> Dan juga Casio mengemukakan bahwa kinerja merujuk kepada pencapaian tujuan karyawan atas tugas yang diberikan.<sup>14</sup> Donnelly mengemukakan juga bahwa kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.<sup>15</sup>

Tinggi rendahnya kinerja pegawai/pengelola tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini Jones (2002:92) mengatakan bahwa Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kinerja yang buruk, antara lain:<sup>16</sup>

(1) kemampuan pribadi;

---

<sup>12</sup> Harold D Stolovitch and Erica J Keeps, *Handbook of Human Performance Technology A Comprehensive Guide for Analysis and Solving Performance Problem in Organizations* (San Francisco: Jersey-Bass Publisher, 1992), 34.

<sup>13</sup> Ricky W Griffin, *Management* (Boston: Houghton Mifflin, 1987), 67.

<sup>14</sup> Wayne F Casio, *Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profit* (Singapore: McGraw-Hill International Editors, 1992), 137.

<sup>15</sup> James H Donnelly, Gibson, James L., and John Ivancevich, *Fundamental of Management*. (Texas: Business Publication, 1994), 210.

<sup>16</sup> Pam Jones, *Buku Pintar Manajemen Kinerja*. Terjemahan Anthony R. Indra. (Jakarta : Metalexia Publishing & PT Qreator Tata Qarakter, 2002), 92.

- (2) kemampuan manajer;
- (3) kesenjangan proses;
- (4) masalah lingkungan;
- (5) situasi pribadi;
- (6) motivasi.

## 2. Konsep Pendistribusian Zakat

Dalam ajaran Islam peruntukan dana zakat sudah sangat cukup jelas. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat At Taubah ayat 60 sebagai berikut:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Ayat tersebut di atas menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.<sup>17</sup> Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih sebgai berikut:<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zaka>h fi> ila>j al-Musykhila>t al-Iqtis}a>diyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139.

<sup>18</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., Fiqhuz Zaka>t), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672.

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahiq;
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (garim) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar;
- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain;
- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat;
- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja; Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahiq, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri;
- f. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu  $\frac{1}{8}$  dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.

Adapun pola pendidtribusi dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat, tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola

pendistribusian secara produktif. Oleh karena itu, pola pendistribusian zakat dapat dibagi kedalam dua pendekatan sebagai berikut:

1. pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin.
2. Pendekatan struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki.<sup>19</sup>

### 3. Pengentasan Kemiskinan

Di dalam peraturan presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dalam ayat 1 pasal 1, menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Pada ayat 2 disebutkan pula tentang program penanggulangan kemiskinan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.<sup>20</sup>

Peraturan presiden No. 15 tahun 2010 berkenaan dengan program pengentasan kemiskinan sesuai dengan program pengentasan kemiskinan menurut Bank dunia. Bank Dunia berkesimpulan bahwa strategi yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan terdiri atas dua bagian yang saling menunjang dan sama pentingnya, yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Penciptaan peluang kerja bagi kaum miskin untuk mendapatkan sumber pendapatan melalui pola pembangunan yang menggalakkan penggunaan tenaga kerja secara efisien.

---

<sup>19</sup> Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 103-104.

<sup>20</sup> Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010

<sup>21</sup> Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*. Surabaya : Airlangga University Press, 1995), 29.



2) Meningkatkan kesejahteraan kaum miskin dan meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan cara meningkatkan pelayanan-pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) bagi kaum miskin.

Dalam hal pengentasan kemiskinan selain memikirkan program apa yang akan dilakukan, terlebih dahulu harus diperhatikan penyebab dari timbulnya kemiskinan tersebut. Karena bobot dan jenis masalah yang dihadapi oleh penduduk miskin di setiap daerah berbeda-beda, sehingga cara penanggulangan kemiskin yang digunakan juga berbeda. Oleh karena itu, kebijakan dan langkah-langkahnya senantiasa perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. program pengentasan kemiskinan hanya berjalan baik dan efektif apabila ada suasana tenteram dan stabil. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan adalah upaya untuk menciptakan ketentraman dan memantapkan kestabilan ekonomi, sosial dan politik. Kestabilan diperlukan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan program ini.
- b. program pengentasan kemiskinan hanya akan dapat berjalan efektif apabila pertumbuhan penduduk dikendalikan. Keluarga kecil yang sejahtera adalah salah satu faktor yang kondusif untuk mencapai sasaran ini. Dalam hal ini, kebijakan dibidang kependudukan, terutama program Keluarga Berencana yang diarahkan secara tajam kepada mereka yang berpenghasilan rendah akan sangat mendukung.
- c. program ini harus dikaitkan dengan kelestarian lingkungan. Lingkungan hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan baik memungkinkan distribusi kesejahteraan antar warga masyarakat secara merata.
- d. program pengentasan kemiskinan harus merupakan program yang berkelanjutan, yang dapat terus-menerus berjalan dan dapat mandiri. Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap, terus-menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian, yaitu kemampuan penduduk miskin untuk menolong diri mereka sendiri. Ini berarti, program pengentasan kemiskinan harus dilandaskan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan produktif. Sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi

---

<sup>22</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 44.

dan pendapatan yang lebih besar dari suatu kegiatan. Dalam upaya meningkatkan kemampuan menghasilkan nilai tambah, paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal : (1) akses terhadap sumber daya; (2) akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien; (3) akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti, penyediaan sarana produksi dan peningkatan ketrampilan harus diimbangi dengan tersediaanya pasar yang terus menerus; (4) akses terhadap sumber pembiayaan. Disini, koordinasi dan pengembangan sistem kredit kecil yang menjangkau masyarakat bawah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

- e. pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan diupayakan sampai ke tingkat yang serendah mungkin. Aparat daerahlah yang mengetahui permasalahan dan lokasi kantong-kantong kemiskinan di daerahnya. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat di daerah itu sendiri. Semakin dekat pelaksana proyek dan kegiatan dengan kelompok sasaran, akan semakin efektif.
- f. tekanan yang paling utama sebaiknya diberikan pada perbaikan pelakunya, manusianya (*invest in people*), menyangkut aspek pendidikan dan kesehatan. Keduanya berkaitan dengan peningkatan akses secara merata dan sekaligus mutu yang lebih baik. Peningkatan akses berarti berbagai program perlu diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil, terutama di luar Jawa.
- g. pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu dan kelompok masyarakat lain yang memerlukan, merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan. Program ini bersifat khusus dan dilaksanakan secara selektif. Langkah yang diperlukan adalah meningkatkan efektifitas, efisiensi dan jangkauan program tersebut.

Berdasarkan uraian di atas berkenaan dengan konsep kinerja penegelola pendistribusian dana zakat dan pengentasan kemiskinan, maka keberadaan BAZNAS Kota Bandung diharapkan dapat membantu pelaksanaan penerapan konsep zakat agar lebih terprogram dan terlaksana dengan baik. Sehingga tujuan dari adanya program zakat sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kemiskinan dapat terwujud. Dan upaya tersebut direalisasikan oleh BAZNAS Kota

Bandung dengan adanya salah satu program penyaluran dana zakat yang terhimpun melalui program pemberdayaan bidang ekonomi. Dimana pelaksanaan penyaluran dana zakat yang terhimpun di BAZNAS Kota Bandung tidak didistribusikan kepada hal yang bersifat konsumtif saja, namun pendistribusian dilakukan juga kepada hal yang bersifat produktif. Pendistribusian yang bersifat produktif dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandung dengan cara program dana bergulir. Program dana bergulir ini dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan modal kepada para pedagang kecil untuk penambahan modal atau memberikan modal kepada seseorang ayang akan memulai usaha. Dan kewajiban seseorang yang mendapatkan bantuan modal tersebut hanya mengembalikan modal pokoknya saja yang dipinjam tanpa ada tambahan. Penegembalian pinjaman modal ini dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kesanggupan para peminjam modal. Selain itu besarnya pengembalian modal secara berkala ini juga disesuaikan dengan besarnya pinjaman.

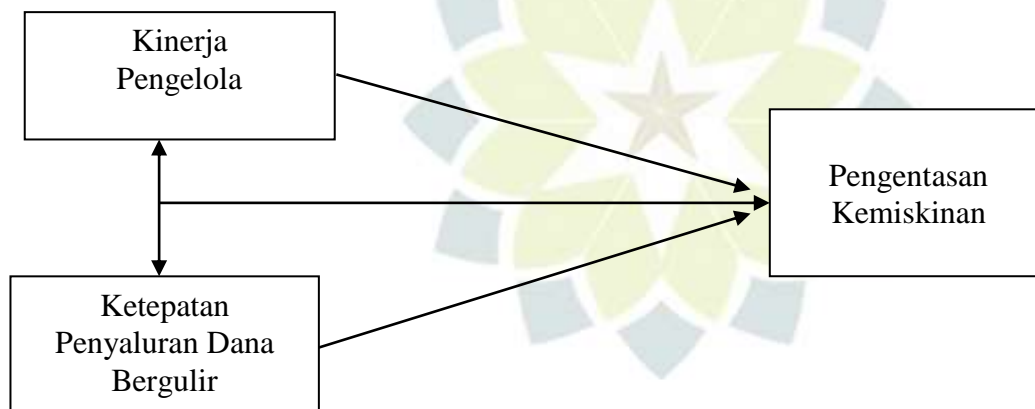
Program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung yang bersifat produktif tersebut bertujuan agar dana zakat yang didistribusikan betul-betul sangat berperan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi, khususnya di lingkungan Kota Bandung. Sehingga tujuan adanya konsep zakat yang ada dalam ajaran Islam sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang kaya saja dapat terwujud. Dan juga harapan kedepannya agar yang tadinya berperan sebagai mustahik zakat, dengan adanya program ini diharapkan justru sebaliknya yaitu menjadi *muzaki* (orang yang mengeluarkan zakat).

Oleh karena itu agar program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung berkenaan dengan program pendistribusian dana zakat berjalan dengan lancar, maka pengelolaan program tersebut harus betul-betul dikelola oleh orang-orang yang memiliki kemampuan akan hal tersebut. Sehingga keefektivan program tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara signifikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung. Maka dari itu keefektivitasan program tersebut mesti diperhatikan, agar apa yang direncanakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa keefektivan program tersebut dapat terwujud tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Adapun yang menjadi faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor kinerja pengelola dan faktor ketepatan penyaluran dana zakat, yaitu salah satunya melalui kegiatan dana bergulir.

Dengan adanya uraian di atas tersebut berkenaan dengan teori-teori yang menjadi faktor keberhasilan kegiatan dana bergulir dalam upaya pengentasan kemiskinan, maka dapat diajukan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Hasil Analisis*

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa kinerja pengelola dan ketepatan penyaluran dana bergulir BAZ Kota Bandung dapat mengentaskan masalah kemiskinan yang terjadi.

## **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu kebenarannya dan perlu dibuktikan melalui penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran objektif tentang pengaruh antara kinerja pengelola dan ketepatan sasaran dana bergulir BAZ Kota Bandung terhadap pengentasan kemiskinan. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh signifikan antara kinerja pengelola BAZ Kota Bandung terhadap pengentasan kemiskinan;
2. Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ketepatan sasaran dana bergulir BAZ Kota Bandung terhadap pengentasan kemiskinan;

3. Diduga terdapat pengaruh signifikan antara kinerja pengelola dan ketepatan penyaluran dana bergulir terhadap pengentasan kemiskinan.

## G. Langkah-langkah Penelitian

Arikunto, Singaribun dan Effendi menyatakan bahwa, Penelitian Survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>23</sup> Sifat penelitian ini adalah explanatory, yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satuvariabel dengan variabel yang lain.<sup>24</sup>

Penelitian dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan pencapaian tujuan dari penulisan ini. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### a. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah setelah melakukan studi pendahuluan kemudian dihubungkan dengan perumusan masalah yang akan diteliti yaitu dengan menggunakan metode survey dengan metode penelitian yang luas, namun hanya aspek-aspek tertentu saja yang akan dibahas. Kemudian dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian eksplanatoris (*explanatory research*). Dikatakan demikian, karena penelitian ini menghubungkan 3 (tiga) variabel, yaitu kinerja pengelola sebagai variabel bebas (*independent variable*, dengan notasi statistik  $X_1$ ) dan ketepatan penyaluran dana bergulir sebagai variabel bebas (*independent variable*, dengan notasi statistik  $X_2$ ), sedangkan pengentasan kemiskinan sebagai variabel terikat (*dependent variable*, dengan notasi statistik Y).

Arikunto Singaribun dan Effendi menyatakan bahwa, Penelitian Survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>25</sup>

Sifat penelitian ini adalah explanatory, yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satuvariabel dengan variabel yang lain.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 56.

<sup>24</sup> Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2000), 57.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 58

<sup>26</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), 42

## b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung dengan alamat Jl. Wastukencana No.27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117, Telepon: (022) 7214655, dengan pertimbangan memudahkan akses pencarian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## c. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif bersumber dari analisis hasil studi pendahuluan dan wawancara, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang diperoleh dari penyebaran kuesioner tertutup, yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih saja. Kuesioner ini diberikan kepada pengelola BAZ Kota Bandung tentang variabel yang diteliti, yaitu kinerja pengelola sebagai variabel X1, dan kecepatan penyaluran dana bergulir sebagai variabel X2 serta pengentasan kemiskinan sebagai variabel Y.

## d. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah pengelola BAZ Kota Bandung, dengan total responden 44 orang sebagai sumber data primer, dokumen-dokumen yang mendukung penelitian dijadikan sumber data sekunder.

## e. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik :

### 1. Wawancara,

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik wawancara tak terstruktur dengan pengelola BAZNAS Kota Bandung. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan dan kondisi serta kecenderungan sekitar subyek, karena sangat penting untuk dijadikan bahan perbandingan dengan data yang diperoleh berdasarkan teknik-teknik lain.

### 2. Kuesioner

Dalam penelitian ini akan menggunakan angket sebagai media untuk memperoleh data primer berupa pengaruh kinerja pengelola, ketepatan penyaluran dana bergulir serta pengentasan kemiskinan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan *Proportionate Stratified Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Metode ini digunakan karena populasinya heterogen, walaupun tidak dibedakan tingkat pendidikan, lamanya bekerja, penghasilan dan sebagainya.

### 3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data dengan cara menggali dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian, seperti teori tentang kinerja, ketepatan penyaluran dana bergulir, serta teori pengentasan kemiskinan. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi bukti logis dan rasional sehingga memperkuat argument dan fakta yang ada di lapangan sebagai bahan penelitian.

### 4. Observasi

Proses Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

### f. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini definisi operasional variabel X dan Y dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Kinerja Pengelola

Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Jadi yang dimaksud dengan kinerja pengelola adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh seseorang yang melakukan pengelolaan sesuai dengan perannya dalam organisasi.

#### 2. Ketepatan Penyaluran Dana Bergulir

ketepatan penyaluran dana bergulir adalah penyaluran dana yang dialokasikan oleh Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi

koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atau tepat sasaran.

### 3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi makro dan mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan definisi operasional di atas maka dalam penelitian ini menghasilkan dimensi dan indikator dari masing-masing variabel yang akan dibahas selanjutnya, gambaran tersebut sebagai berikut :

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
1	Kinerja Pengelola (X1)	Hasil Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat Waktu</li> <li>• Sesuai Target</li> </ul>	Ordinal
		Perilaku Nyata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disiplin</li> <li>• Bertanggung jawab</li> </ul>	Ordinal
2	Ketepatan Penyaluran Dana Bergulir (X2)	Sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan perencanaan</li> </ul>	Ordinal
		Tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai target</li> </ul>	Ordinal
3	Pengentasan Kemiskinan (Y)	Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitematis</li> <li>• Bersinergi</li> </ul>	Ordinal



Operasioanal variabel tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan kuesioner yang disebarkan kepada para responden. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus diuji validitas dan reliabilitasnya.

#### g. Teknik Analisis Data

##### 1. Analisis Instrumen

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala likert. Skala Likert ini merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian (fenomena sosial spesifik), seperti sikap, pendapat dan persepsi sosial seseorang atau sekelompok orang yang berisi lima tingkat jawabanskala jenis ordinal. Dikatakan ordinal karena pernyataan sangat setuju memiliki tingkat yang lebih tinggi dari setuju dan setuju lebih tinggi dari ragu-ragu, demikian seterusnya skala bersifat urutan dan tidak bisa dikatakan setara.

##### 2. Uji Validitas dan Reliabilitas

###### a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah / valid tidak suatu kuesioner, suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menggunakan uji validitas digunakan Korelasi *Product Moment* / korelasi *bivariate*. Korelasi *bivariate* digunakan untuk mencari keeratan hubungan dan arah hubungan yakni semakin tinggi nilai korelasi maka semakin tinggi keeratan hubungan kedua variabel.

###### b. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto realibilitas berhubungan dengan kepercayaan, yakni bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data dikarenakan instrument tersebut sudah baik. Jadi realibilitas merupakan alat mengukur satu set daftar pertanyaan yang merupakan indikator variabel-variabel yang diteliti, pentingya memiliki realinilitas instrument pengukuran yakni setidaknya untuk dua alasan yaitu realibilitas merupakan suatu prasyarat bagi validitas pengujian

serta penelitian menghendaki agar bisa menentukan pengaruh dan suatu variabel atas variabel lainnya.

c. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik dapat dilakukan agar model regresi yang digunakan dapat memberikan hasil yang representatif, uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, serta uji autokorelasi.

d. Merumuskan Hipotesis

Sesuai dengan paradigma penelitian, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1)  $H_0$  : yaitu tidak ada pengaruh signifikan pada variabel independent kinerja pengelola terhadap variabel dependen pengentasan kemiskinan.
- 2)  $H_i$  : yaitu terdapat pengaruh signifikan pada variabel independent kinerja pengelola terhadap variabel dependen pengentasan kemiskinan.

$$H_0 : r_{yX_1} = 0$$

$$H_i : r_{yX_2} > 0$$

- 3)  $H_0$  : yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel independen Ketepatan penyaluran dana bergulir terhadap variabel dependen pengentasan kemiskinan.
- 4)  $H_i$  : yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel independen ketepatan penyaluran dana bergulir terhadap variabel dependen pengentasan kemiskinan.

$$H_0 : r_{yX_1} = 0$$

$$H_i ; r_{yX_2} > 0$$

- 5)  $H_i$  : yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel independen kinerja pengelola dan ketepatan penyaluran dana bergulir terhadap variabel dependen pengentasan kemiskinan.
- 6)  $H_0$  : yaitu ada pengaruh yang signifikan pada variabel kinerja pengelola dan ketepatan penyaluran dana bergulir terhadap variabel dependen pengentasan kemiskinan.

e. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi Berganda adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Formula untuk regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana :

Y = Variabel dependen (Pengentasan kemiskinan)

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = koefisien regresi kinerja pengelola

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi ketepatan penyaluran dana bergulir

X<sub>1</sub> = kinerja pengeloal

X<sub>2</sub> = ketepatan penyaluran dan bergulir

#### f. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dapat dilakukan dengan beberapa tahap terdiri dari :

##### 1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji variabel yang berpengaruh antara X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> terhadap Y secara individual (parsial). Rumus yang digunakan untuk uji signifikan ini dengan koefisien *Korelasi Spearman Rank* dengan rumus sebagai berikut :

$$t = r \frac{n-2}{1-r^2}$$

Dimana :

t = Nilai t hitung

r = korelasi *product moment*

n = banyaknya sampel

Adapun kriteria pengujiannya :

- a. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak Hi diterima berarti pengaruh signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

b. Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$   $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima berarti tidak ada pengaruh signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

## 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika koefisien determinasi nol berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

## 3. Korelasi Berganda

Korelasi Ganda digunakan apabila hipotesis yang dilakukan variabel independen  $X_1$  dan  $X_2$  secara bersama-sama disebut dengan hipotesis alternatif sehingga dapat diketahui korelasi variabel independen  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variabel dependen  $Y$ .

Formulasi untuk korelasi ganda sebagai berikut :

$$r_{YX_1X_2} = \frac{r_{2YX_1} + r_{2YX_2} - 2r_{YX_1}r_{YX_2}r_{X_1X_2}}{1 - r_{2X_1X_2}}$$

Dimana :

$r_{YX_1X_2}$  = Korelasi antara variabel  $X_1$  dengan  $X_2$  secara bersama-sama dengan variabel  $Y$ .

$r_{YX_1}$  = Korelasi Product Moment antara variabel  $X_1$  dengan  $Y$

$r_{YX_2}$  = Korelasi product Moment antara variabel  $X_2$  dengan  $Y$

$r_{X_1X_2}$  = Korelasi Product Moment antara variabel  $X_1$  dengan  $X_2$

## 4. Uji F

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk menguji model secara keseluruhan, melihat keterkaitan variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel terikat. Untuk menguji kebenaran hipotesis alternatif dilakukan uji F dengan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2}{(k-1)}$$

$$1-R^2/(n-k)$$

Dimana :

F = Koefisien korelasi ganda

R<sup>2</sup> = Koefisien regresi

N = Jumlah sampel

K = Jumlah variabel independen

Bila F dihitung > F tabel Ho ditolak dan Hi diterima, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

